

## ABSTRAK

### **KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ( STUDI KASUS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR : 06/G/2006/PTUN-BDG )”**

**HARDIYANTO (2210622078).** KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ( Studi kasus Putusan PTUN Bandung Nomor : 06/G/2006/PTUN-BDG). Dibimbing oleh Taufiqurrahman Syahuri sebagai pembimbing utama dan Ahmad Ahsin Thohari sebagai pembimbing pendamping

Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah bentuk kehadiran Negara dalam rangka memberi wadah kepada masyarakat dalam mencari keadilan yang mengeluarkan Putusan. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bentuk kepastian hukum bagi parapencari keadilan mengenai Tata Usaha Negara dan dasar Pejabat Tata Usaha Negara untuk menindak lanjutinya. Dalam kenyataannya masih terdapat Pejabat Tata Usaha Negara yang belum melaksanakan tidak patuh terhadap putusan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan konseptual. Penelitian menggunakan data-data yang mengacu pada undang-undang literature dan sumber-sumber tertulis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan Putusan Tata Usaha Negara terdapat beberapa kendala diantaranya tidak ada lembaga eksekutor dalam menjalankan Putusan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara lebih mengharapkan niat baik pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakannya karena masih terdapat pengaturan yang tidak tegas terhadap pejabat yang tidak melaksanakannya. Pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif perlu melakukan perubahan di tataran substansi undang-undang maupun peraturan-peraturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci:** Ketidakpatuhan, Tata Usaha Negara, Putusan

## **ABSTRACT**

*HARDIYANTO (2210622078). NON-COMPLIANCE OF STATE ADMINISTRATIVE OFFICIALS WITH STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS WHICH HAVE PERMANENT LEGAL FORCE (case study of Bandung PTUN Decision Number: 06/G/2006/PTUN-BDG). Supervised by Taufiqurrahman Syahuri as main supervisor and Ahmad Ahsin Thohari as co-supervisor*

*The establishment of the State Administrative Court in Indonesia is a form of the presence of the State in order to provide a forum for the community to seek justice that issues decisions. Decisions of the State Administrative Court which have permanent legal force are a form of legal certainty for those seeking justice regarding State Administration and the basis for State Administrative Officials to follow up on them. In reality, there are still State Administrative Officials who have not implemented and do not comply with the decision.*

*This research uses a normative legal method using literature study and a conceptual approach. The research uses data that refers to literature law and written sources*

*The research results show that there are several obstacles to non-compliance by State Administrative officials in implementing State Administrative Decisions, including the absence of an executing agency in implementing State Administrative Decisions. The implementation of State Administrative Decisions requires the good intentions of State Administrative officials in implementing them because there are still unclear regulations regarding officials who do not implement them. Executive and legislative law makers need to make changes at the substance level of laws and regulations concerning the State Administrative Court and the implementation of State Administrative Court Decisions.*

**Keywords:** *Non-compliance, State Administration, Decision*